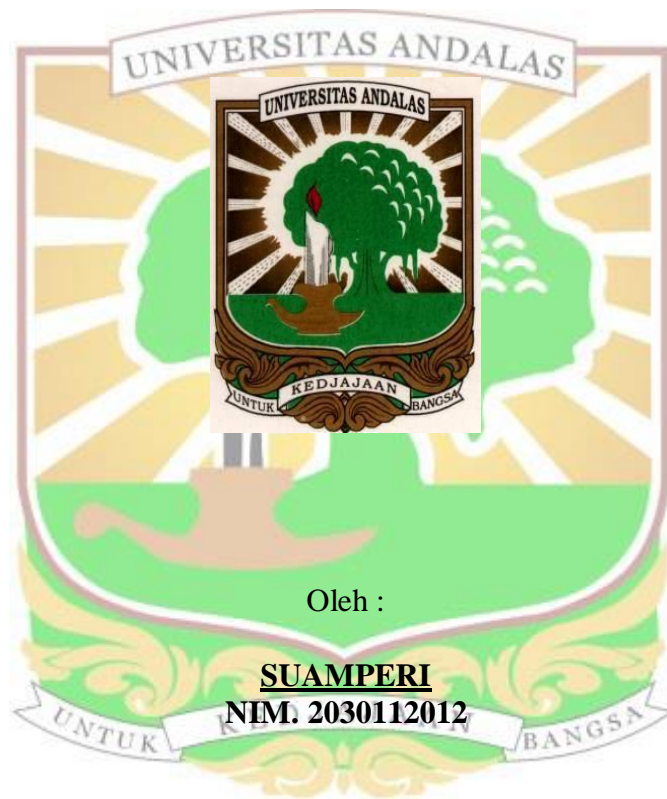


**TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN
ASET BADAN USAHA MILIK DESA
SEBAGAI BADAN HUKUM**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Doktor Hukum



Oleh :

SUAMPERI
NIM. 2030112012

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM

Suamperi, 2030112012, Program Studi Doktorat Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024

ABSTRAK

Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum BUMDesa sebagai badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh desa memang berada dalam kerangka hukum yang unik, karena beroperasi di persimpangan antara hukum publik dan hukum perdata. Konsep ini terlihat dalam struktur dan peran ganda BUMDesa: Kelembagaan BUMDesa Tunduk pada Hukum Publik dan Kegiatan Usaha BUMDesa Tunduk pada Hukum Perdata. Penulisan disertasi ini difokuskan pada Tiga permasalahan: *Pertama* Bagaimanakah Pengaturan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. *Kedua* Bagaimanakah Status kekayaan desa yang dipisah dan ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa. *Ketiga* Bagaimanakah Tanggungjawab pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset badan usaha milik desa. Penelitian ini tergolong hukum normatif yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *librari based focusing on reading and analisis of primary and secondary material*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum, Pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan *Pertama* Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 117 menyatakan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha. Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa menyatakan Aset Badan Usaha Milik Desa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa. Pasal 28 ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa desa, aset desa yang ditempat di BUMDesa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. *Kedua* Status kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada dalam Badan Usaha Milik sebagai badan hukum, Kekayaan desa dipisahkan dan ditempatkan dalam BUMDesa, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan terpisah dari pengelolaan kekayaan desa yang lain. *Ketiga* Tanggungjawab Pelaksana Operasional terhadap pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum, Tanggung jawab administrasi berkaitan dengan pengelolaan yang mematuhi aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, Secara Hukum Perdata mengatur kewajiban pelaksana operasional BUMDesa dalam hal perjanjian, transaksi, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Tanggung Jawab Secara Hukum Pidana Pelaksana operasional BUMDesa juga dapat dikenai tanggung jawab pidana jika terdapat pelanggaran hukum yang merugikan BUMDesa.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Aset BUMDesa Sebagai, badan hukum

RESPONSIBILITIES OF OPERATIONAL EXECUTORS IN MANAGING ASSETS OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AS A LEGAL ENTITY

**Suamperi, 2030112012, Doctoral of Law Study Programme
Faculty of Law, Andalas University, 2024**

ABSTRACT

The regulation of asset management of village-owned enterprises as legal entities BUMDesa as a business entity formed and owned by the village is indeed in a unique legal framework, because it operates at the intersection of public law and civil law. This concept is seen in the structure and dual role of BUMDesa: BUMDesa Institution Subject to Public Law and BUMDesa Business Activities Subject to Civil Law. The writing of this dissertation is focussed on three issues: Firstly How is the regulation of asset management of Village-Owned Enterprises as legal entities. Second How is the status of village assets that are separated and placed in the Village-Owned Enterprises. Third How is the responsibility of the operational executor for the management of assets of village-owned enterprises. This research is classified as normative law that is studied is legal material so that it can be said to be librari based focusing on reading and analysis of primary and secondary material. The research approach used in this research is a legal approach, conceptual approach, comparative legal approach, historical approach and case approach. The results of the research state Firstly , BUMDesa as a business entity formed and owned by the village is indeed in a unique legal framework, as it operates at the intersection of public law and civil law. This concept can be seen in the structure and dual role of BUMDesa: a. BUMDesa Institution is Subject to Public Law and BUMDesa Business Activities are Subject to Civil Law Although the institution is regulated by public law, its business activities are subject to the provisions of civil law. BUMDesa is an entity born from public policy as part of the government's efforts to empower villages and improve the welfare of rural communities. Second The status of village assets separated and placed in BUMDesa as a legal entity, the village assets are separated and placed in BUMDesa, then the management must be done professionally and separately from the management of other village assets. Third, the Operational Executor's Responsibility for the management of BUMDesa assets as a legal entity, Administrative responsibility is related to management that complies with the rules or regulations set by the government, Civil Law regulates the obligations of BUMDesa operational executors in terms of agreements, transactions, and legal relations with third parties. Criminal Law Responsibilities BUMDesa operational executors can also be subject to criminal liability if there are violations of law that harm BUMDesa.

Keywords: Liability, BUMDesa Assets As, Legal Entity